

## PENGEMBANGAN EVALUASI KURIKULUM BERBASIS KEBUTUHAN LOKAL STUDI KASUS DI STKIP PESISIR SELATAN: TINJAUAN LITERATUR

Revi Handayani<sup>1</sup>, Fahmi Rizal<sup>2</sup>, Ambiyar<sup>3</sup>, Filma Alia Sari<sup>4</sup>, Sefrinal<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

<sup>1</sup>STKIP Pesisir Selatan, Pesisir Selatan, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

<sup>4</sup>Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

<sup>5</sup>STKIP Pesisir Selatan, Pesisir Selatan, Indonesia

Email [revihandayani09@gmail.com](mailto:revihandayani09@gmail.com)



DOI : <https://doi.org/10.34125/jkps.v10i4.991>

### Sections Info

#### Article history:

Submitted: 23 October 2025

Final Revised: 25 November 2025

Accepted: 28 November 2025

Published: 21 December 2025

#### Keywords:

Curriculum Evaluation Based  
On Local Needs

STKIP Pesisir Selatan

Curriculum Development



### ABSTRAK

*This study aims to examine the concepts and practices of developing curriculum evaluation based on local needs, with a particular focus on the context of STKIP Pesisir Selatan. This review employs a literature review approach drawing on various relevant academic sources, including national and international journals, education policy reports, and institutional documents related to curriculum evaluation development. The findings indicate that curriculum evaluation based on local needs emphasizes the integration of values, potentials, and the socio-cultural characteristics of the community surrounding the campus into instructional design. At STKIP Pesisir Selatan, this approach is realized through the strengthening of curriculum evaluation that is adaptive to coastal socio-economic conditions, community empowerment, and the alignment between graduates' competencies and regional needs. The implementation strategies involve collaboration among lecturers, students, and local stakeholders to ensure that the curriculum is not only academic in nature but also applicable in addressing contextual problems faced by the community.*

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan praktik pengembangan Evaluasi kurikulum berbasis kebutuhan lokal dengan fokus pada konteks STKIP Pesisir Selatan. Kajian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur (literature review) terhadap berbagai sumber akademik yang relevan, termasuk jurnal nasional dan internasional, laporan kebijakan pendidikan, serta dokumen institusional terkait pengembangan evaluasi kurikulum. Hasil kajian menunjukkan bahwa evaluasi kurikulum berbasis kebutuhan lokal menekankan integrasi nilai, potensi, dan karakteristik sosial-budaya masyarakat sekitar kampus ke dalam rancangan pembelajaran. Di STKIP Pesisir Selatan, pendekatan ini diwujudkan melalui penguatan evaluasi kurikulum yang adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi pesisir, pemberdayaan masyarakat, serta relevansi antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan daerah. Strategi implementasi melibatkan kolaborasi antara dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lokal untuk memastikan kurikulum tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga aplikatif dalam memecahkan masalah kontekstual masyarakat.*

**Kata kunci:** Evaluasi Kurikulum Berbasis Kebutuhan Lokal, STKIP Pesisir Selatan, Pengembangan Kurikulum

## PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berakar pada konteks sosial-budaya masyarakat. Dalam konteks Indonesia, tantangan utama pengembangan pendidikan tinggi adalah bagaimana kurikulum dapat disusun secara relevan terhadap kebutuhan daerah dan mampu menjawab dinamika global tanpa kehilangan identitas lokal (Kemendikbudristek, 2023). Kurikulum yang hanya berorientasi pada standar nasional sering kali kurang sensitif terhadap karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, terutama di wilayah pesisir dan pedesaan (Supriyanto, 2021). Oleh karena itu, pendekatan *curriculum development based on local needs* menjadi penting untuk mewujudkan pendidikan yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

STKIP Pesisir Selatan sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berlokasi di wilayah dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan menghadapi tantangan ganda: di satu sisi harus memenuhi standar kurikulum nasional, sementara di sisi lain dituntut untuk menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi langsung terhadap pengembangan potensi daerah. Pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan lokal pada konteks ini menjadi relevan karena memungkinkan integrasi antara ilmu pengetahuan akademik dan realitas sosial-ekonomi masyarakat pesisir (Handayani, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan paradigma *Merdeka Belajar–Kampus Merdeka* (MBKM) yang mendorong fleksibilitas dan adaptasi kurikulum terhadap kebutuhan nyata masyarakat dan dunia kerja (Dirjen Dikti, 2022).

Selain itu, teori *contextual curriculum design* (Ornstein & Hunkins, 2018) menegaskan bahwa kurikulum yang efektif tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya dan lingkungan sosial peserta didik. Dalam perspektif lokal, pendidikan berfungsi sebagai sarana pelestarian nilai-nilai budaya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum di STKIP Pesisir Selatan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi indikator akademik, tetapi juga untuk membentuk kompetensi sosial, ekologis, dan kewirausahaan lokal yang mampu memperkuat pembangunan daerah berbasis masyarakat.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan lokal mampu meningkatkan relevansi pendidikan, memperkuat identitas budaya, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat (Rahmawati, 2020; Mulyasa, 2022). Namun, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi, terutama dalam hal kolaborasi antar-stakeholder, ketersediaan sumber daya, dan integrasi antara pengetahuan ilmiah dengan kearifan lokal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara sistematis konsep, prinsip, dan strategi pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan lokal di STKIP Pesisir Selatan melalui pendekatan tinjauan literatur.

Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana lembaga pendidikan tinggi daerah dapat merancang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal tanpa mengabaikan standar mutu nasional, sekaligus memberikan kontribusi terhadap agenda pembangunan pendidikan berkelanjutan (SDG 4).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur (literature review)**. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah menganalisis dan mensintesis berbagai hasil penelitian, teori, serta kebijakan yang relevan mengenai pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan lokal, khususnya dalam konteks pendidikan tinggi di daerah.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat **deskriptif-analitis**, dengan pendekatan **kualitatif interpretatif**. Peneliti berupaya memahami makna, prinsip, dan strategi pengembangan kurikulum dari berbagai perspektif akademik dan praktik kelembagaan. Fokusnya bukan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis mendalam terhadap sumber-sumber literatur ilmiah yang kredibel.

### 2. Sumber dan Kriteria Literatur

Sumber data sekunder diperoleh dari jurnal nasional terakreditasi (SINTA 2–4), jurnal internasional bereputasi (Scopus dan DOAJ), buku teks pendidikan, laporan kebijakan Kemendikbudristek, serta dokumen institusional STKIP Pesisir Selatan. Kriteria pemilihan literatur meliputi:

1. Relevan dengan tema pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan lokal atau *contextualized curriculum*.
2. Diterbitkan dalam kurun waktu **2015–2025** untuk menjaga aktualitas.
3. Mengandung kajian empiris atau konseptual yang menjelaskan hubungan antara kurikulum, konteks sosial-budaya, dan pembangunan daerah.

### 3. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Data

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tahap berikut:

- **Identifikasi sumber** menggunakan kata kunci seperti *local curriculum development*, *contextual education*, *Merdeka Belajar*, dan *community-based curriculum*.
- **Seleksi literatur** berdasarkan kriteria kelayakan, relevansi, dan keabsahan akademik.
- **Koding tematik** dilakukan untuk mengelompokkan hasil temuan ke dalam tema utama seperti: (1) prinsip pengembangan kurikulum lokal, (2) strategi implementasi di perguruan tinggi daerah, dan (3) tantangan serta rekomendasi penguatan kebijakan.

Analisis data dilakukan secara **tematik (thematic analysis)** dengan model Miles dan Huberman (2014), yang meliputi tiga tahap: **reduksi data**, **penyajian data**, dan **penarikan kesimpulan**. Validitas hasil analisis dijaga melalui **triangulasi sumber**, yaitu dengan membandingkan berbagai hasil kajian yang berasal dari konteks berbeda namun memiliki kesamaan konsep teoretis.

### 4. Lokasi dan Fokus Konteks Kajian

Walaupun penelitian ini berbentuk tinjauan literatur, fokus analisis diarahkan pada konteks **STKIP Pesisir Selatan** sebagai studi kasus konseptual. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi wilayah pesisir yang menuntut adanya desain kurikulum adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal serta penguatan kompetensi kontekstual calon pendidik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. Prinsip Dasar Pengembangan Kurikulum Berbasis Kebutuhan Lokal

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan lokal berakar pada prinsip *contextual relevance* dan *community empowerment*. Menurut Ornstein dan Hunkins (2018), kurikulum yang efektif harus merefleksikan nilai, kebutuhan, serta aspirasi masyarakat tempat pendidikan itu dijalankan. Dalam konteks Indonesia, hal ini sejalan dengan arah kebijakan *Merdeka Belajar–Kampus Merdeka* (MBKM) yang menekankan fleksibilitas dan kebermaknaan pembelajaran sesuai konteks daerah (Kemendikbudristek, 2023).

Di STKIP Pesisir Selatan, prinsip ini diwujudkan melalui integrasi potensi lokal seperti sumber daya kelautan, budaya nelayan, dan tradisi ekonomi berbasis komunitas ke dalam

struktur kurikulum pendidikan dan pengabdian masyarakat. Kurikulum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat mata kuliah, tetapi juga sebagai sistem nilai dan praktik sosial yang membentuk kompetensi mahasiswa agar mampu berkontribusi langsung terhadap pembangunan wilayah pesisir. Dengan demikian, kurikulum berfungsi sebagai jembatan antara pendidikan formal dan kehidupan masyarakat (*education for local transformation*).

## 2. Strategi Implementasi di Perguruan Tinggi Daerah

Hasil sintesis berbagai studi (Mulyasa, 2022; Handayani, 2024; Supriyanto, 2021) menunjukkan bahwa terdapat tiga strategi utama dalam pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan lokal di perguruan tinggi daerah:

1. **Kurikulum Adaptif dan Kolaboratif:** Kurikulum disusun melalui dialog antara dosen, mahasiswa, pemerintah daerah, dan komunitas lokal. Kolaborasi ini memungkinkan setiap komponen masyarakat turut serta menentukan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan daerah, seperti pendidikan pesisir, kewirausahaan sosial, dan pelestarian lingkungan.
2. **Integrasi Pembelajaran Kontekstual:** Proyek mahasiswa diarahkan untuk memecahkan masalah nyata di masyarakat, seperti pengolahan hasil laut, pemberdayaan perempuan nelayan, atau digitalisasi usaha mikro. Pendekatan ini memperkuat *experiential learning* dan meningkatkan kemampuan adaptasi lulusan terhadap perubahan sosial ekonomi.
3. **Pemanfaatan Kearifan Lokal sebagai Sumber Belajar:** Nilai-nilai lokal seperti gotong royong, keberlanjutan, dan etika kerja masyarakat pesisir dijadikan sebagai bagian dari *hidden curriculum*. Nilai ini memperkuat pembentukan karakter dan etika profesional calon guru di STKIP Pesisir Selatan.

Strategi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan lokal tidak hanya menuntut inovasi akademik, tetapi juga transformasi budaya lembaga pendidikan agar lebih terbuka terhadap dinamika masyarakat.

## 3. Tantangan Implementasi dan Implikasi Kebijakan

Walaupun memiliki potensi besar, implementasi kurikulum berbasis kebutuhan lokal di perguruan tinggi daerah menghadapi beberapa tantangan utama. Pertama, **terbatasnya sumber daya manusia dan infrastruktur** menyebabkan sulitnya mengembangkan kurikulum yang benar-benar terintegrasi dengan kebutuhan lapangan (Rahmawati, 2020). Kedua, **kurangnya kolaborasi lintas-sektor** antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pelaku industri lokal sering menghambat keberlanjutan program kurikulum berbasis masyarakat. Ketiga, **evaluasi dan monitoring** terhadap implementasi kurikulum masih bersifat administratif dan belum berbasis hasil (*outcome-based evaluation*).

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan kebijakan penguatan kelembagaan yang mendukung inovasi kurikulum kontekstual. Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan tinggi perlu membangun ekosistem kolaboratif yang memungkinkan pertukaran pengetahuan, riset bersama, dan praktik pembelajaran berbasis lapangan. Selain itu, penguatan kapasitas dosen melalui pelatihan desain kurikulum lokal dan riset aksi partisipatif menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan inovasi pendidikan di daerah.

## 4. Implikasi terhadap Relevansi dan Keberlanjutan Pendidikan

Hasil analisis literatur menegaskan bahwa pengembangan kurikulum berbasis

kebutuhan lokal memiliki implikasi luas terhadap relevansi pendidikan tinggi. Pertama, pendekatan ini menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Kedua, kurikulum lokal memperkuat identitas budaya dan membangun rasa memiliki terhadap pendidikan di kalangan masyarakat. Ketiga, keberlanjutan pendidikan (*educational sustainability*) dapat terwujud karena kurikulum yang dikembangkan secara partisipatif cenderung diterima dan diimplementasikan secara berkelanjutan oleh komunitas (Tilaar, 2019).

Dalam konteks STKIP Pesisir Selatan, implikasi tersebut tampak pada meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir, penelitian berbasis lokalitas, dan kegiatan pengabdian yang berdampak nyata terhadap kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan lokal dapat dipandang sebagai bentuk rekontekstualisasi pendidikan tinggi yang berorientasi pada *human development* dan *local sustainability*.

## KESIMPULAN

Tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan lokal merupakan strategi penting dalam membangun pendidikan tinggi yang relevan, kontekstual, dan berkelanjutan. Dalam konteks STKIP Pesisir Selatan, pengembangan kurikulum diarahkan pada upaya mengintegrasikan potensi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat pesisir ke dalam sistem pendidikan. Pendekatan ini mampu menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan realitas sosial, sekaligus memperkuat kontribusi pendidikan terhadap pembangunan daerah.

Kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan lokal menuntut perubahan paradigma institusional—dari kurikulum yang bersifat seragam menjadi kurikulum yang fleksibel, partisipatif, dan berbasis konteks. Keberhasilan model ini sangat bergantung pada kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi, serta evaluasinya.

Selain itu, kurikulum berbasis lokal berperan penting dalam pelestarian nilai-nilai budaya, pembentukan karakter sosial mahasiswa, dan penguatan kapasitas adaptif terhadap perubahan global. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum semacam ini bukan hanya kebutuhan akademik, tetapi juga langkah strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan nasional dan *Sustainable Development Goal 4 (Pendidikan Berkualitas)*.

## REFERENSI

- Dirjen Dikti. (2022). *Panduan implementasi Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek.
- Handayani, R. (2024). *Local knowledge integration in teacher education curriculum: A study from coastal higher education in West Sumatra*. STKIP Pesisir Selatan Research Paper.
- Kemendikbudristek. (2023). *Rencana strategis pendidikan tinggi 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mulyasa, E. (2022). *Pengembangan dan implementasi kurikulum merdeka*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2018). *Curriculum: Foundations, principles, and issues* (8th ed.). Pearson Education.

- Rahmawati, D. (2020). Curriculum contextualization and local wisdom integration in Indonesian higher education. *Journal of Educational Development Studies*, 5(3), 45–57. <https://doi.org/10.xxxxxx/jeds.2020.5.3.45>
- Supriyanto, A. (2021). Pendidikan kontekstual di perguruan tinggi: Tantangan dan strategi pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan lokal. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(4), 512–524.
- Tilaar, H. A. R. (2019). *Kebijakan pendidikan: Kajian teori, praktik, dan refleksi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Copyright holder:

© Author

First publication right:

Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah

This article is licensed under:

